

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Nazir (2009 : 84) mengatakan bahwa “Design (rancangan) penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sugiyono (2009 : 21) mengemukakan bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Bentuk penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

#### **3.2 Operasionalisasi Variabel**

Seperti yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penulisan Skripsi (POPS, 2013 : 20), bahwa “operasionalisasi variabel adalah menjelaskan dimensi (jika ada) dan indikator-indikator dari setiap variabel penelitian.”

Hatch dan Farhadi (dalam Sugiyono, 2010 : 3) mengatakan bahwa “Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau objek dengan objek yang lain”. Secara teori,



definisi variabel penelitian adalah merupakan suatu objek, atau sifat, atau atribut atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Definisi dari masing-masing variabel, yaitu:

#### 1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004 : 134).

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa “pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Efektivitas pajak penerangan jalan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berhasil mencapai potensi yang sebenarnya harus dicapai pada suatu periode tertentu.

#### 2. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Menurut Halim (2004 : 94) yang dimaksud PAD adalah “penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### 3. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah besar kecilnya pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah perolehan pajak yang berdasarkan potensi yang sebenarnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi penerimaan pajak penerangan jalan</li> <li>• Target penerimaan pajak penerangan jalan</li> <li>• Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan</li> </ul>	
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi penerimaan pajak penerangan jalan</li> <li>• Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan</li> <li>• Realisasi penerimaan PAD</li> </ul>	-

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Perimbangan</li> <li>• Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi penerimaan PAD</li> <li>• Realisasi total penerimaan daerah</li> </ul>	-

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengklasifikasikan sumber data, Menurut Arikunto (2006 : 129) “sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh”. Sumber data yang dipakai merupakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2009 : 309), “Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah berupa laporan keuangan selama enam tahun yang diambil dari periode tahun 2007 hingga tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Majalengka dan PT PLN (Persero) UPJ Majalengka, UPJ Jatiwangi, UPJ Kuningan, UPJ Ciamis serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel-variabel berupa catatan-catatan, laporan-laporan dan dokumen-dokumen khususnya laporan keuangan yang dimiliki oleh DPKAD Kab. Majalengka serta laporan penjualan listrik dari PT. PLN (Persero).
- b. Wawancara adalah usaha pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak dalam suatu instansi yang memiliki kompetensi dengan objek yang diteliti. Wawancara memberikan informasi kepada peneliti tentang data-data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara dengan pihak DPKAD Kab. Majalengka serta pihak PLN.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD, dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Menghitung potensi pajak penerangan jalan pada tahun 2012

Perhitungan potensi penerimaan pajak penerangan jalan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sementara untuk nilai basis pajak penerangan jalan diperoleh dari rumus:

$$\text{Basis Pajak Penerangan Jalan} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya}$$

Sumber: Harun (2003 : 24)

- 2) Menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan berdasarkan potensi (2012)

Untuk mengetahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Penerangan Jalan} = \frac{RPPPJ}{PPPPJ} \times 100\%$$

Sumber: Simanjuntak dalam Halim (2004 : 93)

Keterangan:

RPPPJ= Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

PPPPJ= Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Klasifikasi tingkat rasio efektivitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan potensi dapat diinterpretasikan pada kriteria berikut:

**Tabel 3.2**  
**Interpretasi Nilai Efektivitas**

Presentasi Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif

Presentasi Efektivitas	Kriteria Efektivitas
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

- 3) Menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan berdasarkan target (2007—2012)

Untuk menghitung efektivitas Pajak Penerangan Jalan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Penerangan Jalan} = \frac{RPPPJ}{TPPPJ} \times 100\%$$

Sumber: Simanjuntak (dalam Halim, 2004 : 93)

Keterangan:

RPPPJ= Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

TPPPJ= Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Klasifikasi tingkat rasio efektivitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan potensi dapat diinterpretasikan pada kriteria berikut:

**Tabel 3.3**  
**Interpretasi Nilai Efektivitas**

Presentasi Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif



Presentasi Efektivitas	Kriteria Efektivitas
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

- 4) Menyusun tabel kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi berdasarkan realisasi, kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Sumber: Syafri Daud (dalam Halim, 2002 : 163)

Dimana:

X = Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Z = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Klasifikasi tingkat rasio kontribusi menurut realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diinterpretasikan pada kriteria berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kalsifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00% - 10%	Sangat Kurang
Rasio 10,10% - 20%	Kurang
Rasio 20,10% - 30%	Sedang
Rasio 30,10% - 40%	Cukup
Rasio 40,10% - 50%	Baik
Rasio Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991

- 5) Menyusun tabel kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD.

Kontribusi berdasarkan potensi, kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Sumber: Syafri Daud (dalam Halim, 2002: 163)

Dimana:

X = Potensi Pajak Penerangan Jalan

Z = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Klasifikasi tingkat rasio kontribusi menurut potensi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diinterpretasikan pada kriteria berikut:

**Tabel 3.5**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Rasio 0,00% - 10%	Sangat Kurang
Rasio 10,10% - 20%	Kurang
Rasio 20,10% - 30%	Sedang
Rasio 30,10% - 40%	Cukup
Rasio 40,10% - 50%	Baik
Rasio Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991

6) Menghitung Tingkat Kemandirian Daerah

Menghitung tingkat kemandirian daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan perhitungan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD). Halim (2004 : 24) menjelaskan perhitungan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2007 : 232)

Hasil perhitungan tersebut, kemudian dideskripsikan, dibantu dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2004 : 189)

